



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : RSUD KABUPATEN KARANGANYAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MULYADI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 413954

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.096.847.000
1. Tanah Seluas 3.500 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 95.310.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 928 m2/120 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 464.392.000		
3. Tanah Seluas 3.165 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 284.795.000		
4. Tanah Seluas 2.895 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 252.350.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	447.000.000
1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA REBORN Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 375.500.000		
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
4. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 24.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	35.640.750



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.579.487.750
III. HUTANG	Rp.	915.636.916
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	663.850.834

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.